

ABSTRAK

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus – menerus dan teratur dengan tujuan tetap adanya kepastian hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah. Namun dalam prakteknya memungkinkan terjadinya pemalsuan sertifikat hak atas tanah baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah akibat hukum bagi pemilik sertifikat ganda di Kota Tangerang Selatan dan peran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam menyelesaikan permasalahan akibat adanya sertifikat ganda di Kota Tangerang Selatan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan dan data sekunder berupa studi pustaka. Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat akibat hukum bagi pemilik sertifikat ganda. Akibat hukum tersebut dapat berupa pencabutan hak atas tanah yang dimiliki pemilik sertifikat ganda berdasarkan putusan yang dilakukan oleh pengadilan sehingga kantor pertanahan hanya bersifat administratif saja yakni dalam hal menyediakan data guna menyelesaikan permasalahan gugatan ke pengadilan. Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sertifikat ganda yaitu melayani aduan mengenai kasus pertanahan, mengkaji kasus tersebut, dan memfasilitasi para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda di Kota Tangerang Selatan.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kepemilikan sertifikat ganda memiliki akibat hukum berupa pencabutan hak atas tanah yang dimiliki sesuai putusan dari pengadilan. Dan peran kantor pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda berupa pelaksanaan gelar kasus internal, gelar kasus eksternal, gelar mediasi, dan gelar istimewa.

Kata kunci: sertifikat ganda, pendaftaran tanah, kantor pertanahan.